

Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Pemerintah dan IPM Terhadap PDRB di Sumatera Utara

Jelin Rachel Stephoney Saragih¹ Jessica Septy Leony Simanungkalit² Mirna Salifah Siregar³

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: jelinsaragih11@gmail.com¹ jescaseleonsy25@gmail.com²
mirnasiregar83@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, belanja pemerintah, dan ipm terhadap PDRB di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan PDRB. Banyak indikator yang dapat mempengaruhi kondisi PDRB, yaitu Pajak Daerah, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan alat analisis yaitu analisis regresi data panel. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PDRB, dengan variabel independen adalah Pajak Daerah, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan namun positif, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan dan positif. Diharapkan meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, kebijakan yang tepat dalam pengalokasian belanja pemerintah, dan memperbanyak program peningkatan indeks pembangunan manusia, Untuk meningkatkan PDRB di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Belanja Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam salah satu dari banyak negara berkembang yang harus selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonominya. Menurut Sukirno (2011:13-14), di dalam buku (Lincoln Arsyad). "perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita". Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidaknya. Sumatera utara salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi regional yang tercatat baik. Dimana angka PDRB yang dimiliki Sumatera utara terbilang cukup besar. Tercatat pada tahun 2013 - 2022, PDRB Sumatera utara selalu menunjukkan peningkatan dan hanya menunjukkan penurunan pada tahun 2020. Kondisi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. PDRB Prov Sumut

prov	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
sumut	29343 040.07	30477 071.97	31637 413.89	32885 087.69	34183 579.22	35570 497.00	36853 594.00	36175 157.00	36666 202.00	37943 827.31

PDRB Sumatera Utara hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 terutama akibat dampak pandemi Covid-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian sangat terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Namun, dapat dikatakan bahwa PDRB

Sumatera Utara masih dikatakan stabil, adanya hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja. Terdapat banyak indikator yang digunakan untuk meningkatkan nilai PDRB yang dimiliki suatu daerah atau provinsi. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:12). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah sebagai berikut: "Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah."

Zhang dan Cui menyebutkan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya ditentukan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut Zhang dan Cui meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan meningkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya. Berikut merupakan data angka PDRB dan data PAJAK DAERAH pada kabupaten Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi tahun 2013-2022:

Tabel 2. Pajak Daerah dan PDRB

Daerah	Tahun	PDRB	Pajak Daerah
Deli Serdang	2013	26746146.72	364720000
	2014	30477071.97	418680000
	2015	31637413.89	463126092
	2016	32885087.69	487186468
	2017	30734437.46	484520000
	2018	31703566	660622000
	2019	32323392	940882220
	2020	36611692	949025000
	2021	37176568	1183640522
	2022	38674107.67	1201597000
Pematangsiantar	2013	29413826.89	30381827
	2014	30984516.02	30781827
	2015	32304024.93	33206827
	2016	33589800.87	35715000
	2017	34790061.93	39730000
	2018	36174303	40100000
	2019	37562875	45815000
	2020	35261711	50875000
	2021	35261545	53100000
	2022	36046911.94	68200000
Tebing Tinggi	2013	19168156.84	9495000
	2014	19923077.37	14745000

	2015	20631316.47	16418500
	2016	21401550.46	18177000
	2017	22251504.28	21357000
	2018	23130037	24226943
	2019	23924932	27740000
	2020	22810098	30690000
	2021	23002800	33010000
	2022	23547032.84	35301000

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pajak daerah di kabupaten/kota Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak daerah tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang serta penerimaan pajak daerah terendah berada di Kabupaten Tebing tinggi. Belanja pemerintah digunakan sebagai salah satu pemicu kegiatan ekonomi. Menurut Halim (2004) belanja pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.. Belanja pemerintah merupakan kegiatan pembelanjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Rahman & Chamelia, 2015). Hubungan PDRB dengan belanja pemerintah Secara teori ekonomi makro Keynesian pada dasarnya peningkatan belanja pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, besarnya nilai pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa dengan peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah dapat mengakibatkan peningkatan PDRB. Berikut merupakan data angka PDRB dan data Belanja Pemerintah pada kabupaten Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi tahun 2013-2022:

Tabel 3. Belanja Pemerintah dan PDRB

Daerah	Tahun	PDRB	Belanja
Deli Serdang	2013	26746146.72	789236965
	2014	30477071.97	2818272050
	2015	31637413.89	3260499837
	2016	32885087.69	3529117634
	2017	30734437.46	3497039137
	2018	31703566	3766358253
	2019	32323392	4016480823
	2020	36611692	3978483270
	2021	37176568	4026683296
	2022	38674107.67	4229535000
Pematangsiantar	2013	29413826.89	789236965
	2014	30984516.02	815561491
	2015	32304024.93	1007049201
	2016	33589800.87	1043382390
	2017	34790061.93	1083339077
	2018	36174303	997384585
	2019	37562875	1068339717
	2020	35261711	1046242301
	2021	35261545	920352930
	2022	36046911.94	999032274
Tebing Tinggi	2013	19168156.84	497470676
	2014	19923077.37	565613522
	2015	20631316.47	651370602
	2016	21401550.46	866578359
	2017	22251504.28	737568473
	2018	23130037	790416665

	2019	23924932	749166359
	2020	22810098	638361961
	2021	23002800	776303362
	2022	23547032.84	726730425

Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa rata-rata Belanja Pemerintah di kabupaten/kota Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 di kabupaten/kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. IPM juga merupakan faktor penting dalam peningkatan nilai PDRB. Indeks pembangunan manusia adalah model pembangunan dengan tujuan guna meningkatkan pengetahuan penduduk agar lebih sejahtera dan berkecukupan secara ekonomi (Lestari & Fitrayati, 2013). BPS (2015) menjelaskan bahwa komponen yang diukur dalam IPM adalah pendapatan perkapita, angka harapan hidup, pendidikan dan tingkat buta huruf. IPM adalah indeks yang bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja pembangunan sosial ekonomi, menggabungkan pencapaian dari bidang, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Budihardjo et al., 2020). Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui kesempatan kerja. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki keterkaitan satu sama lain karena apabila tingkat pertumbuhan ekonomi baik maka pembangunan manusia pun akan membaik. Menurut Denni Sulistio Mirza dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dapat dilihat melalui kebijakan dan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran pemerintah mengidentifikasi besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia. Dapat dikatakan pengeluaran pemerintah merupakan hal utama yang memicu adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Berikut merupakan data angka PDRB dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi tahun 2013-2022:

Tabel 4. IPM dan PDRB

Daerah	Tahun	PDRB	IPM
Deli Serdang	2013	26746146.72	71.39
	2014	30477071.97	71.98
	2015	31637413.89	72.79
	2016	32885087.69	73.51
	2017	30734437.46	73.94
	2018	31703566	74.92
	2019	32323392	75.43
	2020	36611692	75.44
	2021	37176568	75.53
	2022	38674107.67	76.19
Pematangsiantar	2013	29413826.89	75.05
	2014	30984516.02	66.05
	2015	32304024.93	76.34
	2016	33589800.87	76.9
	2017	34790061.93	77.54
	2018	36174303	77.88
	2019	37562875	78.57
	2020	35261711	78.75
	2021	35261545	79.17

	2022	36046911.94	79.7
Tebing Tinggi	2013	19168156.84	71.85
	2014	19923077.37	75.83
	2015	20631316.47	72.81
	2016	21401550.46	73.58
	2017	22251504.28	73.9
	2018	23130037	74.5
	2019	23924932	75.08
	2020	22810098	75.17
	2021	23002800	75.42
	2022	23547032.84	76.17

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa rata-rata IPM di kabupaten/kota Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2014 di kabupaten/kota Pematang Siantar mengalami penurunan.

Landasan Teori

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Menurut BPS (2007: 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dan seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai dan barang jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut. Jadi ini dapat diartikan bahwa PDRB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tersebut. (Sukirno, 2006: 33). Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Adriani dalam (Sabil, 2016) mendefinisikan “pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan Pajak Daerah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan Pemerintahan dan kepentingan umum suatu Daerah. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan kepentingan pembangunan serta Pemerintahan lainnya. Menurut (Sabil, 2016) dalam jurnalnya ciri-ciri Pajak Daerah adalah:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau Badan Pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Belanja Pemerintah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja merupakan semua kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2004) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintahan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar untuk pelaksanaan kewajiban wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2005 belanja merupakan suatu pengeluaran dari rekening kas umum Negara Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan.

Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan bidang ekonomi adalah faktor paling penting dalam sebuah proses pembangunan namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mendorong kemajuan sebuah perekonomian. Tapi, pembangunan manusia juga harus menjadi bagian penting dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dipandang dari segi finansial dan material semata. Oleh karena itu suatu pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro M. P., *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, 1994). Amartya Sen mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses perluasan dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil dari Negara yang sedang membangun adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Pembangunan sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya (kuncoro, 1997). Sumber daya manusia (human resources) dari suatu bangsa, tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro M. P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 1999). Sejarah mencatat bahwa Negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami diminishing return tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan (kuncoro, 1997). Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.
2. Pemerataan Dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir 16 kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbarui.
4. Pemberdayaan Penduduk Dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan. Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut diatas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan sosial, politik sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan drajat pribadi dan jasmani hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari model tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistika inferensial. Penggunaan data sekunder berupa data panel. Sumber data berasal dari Badan

Pusat Statistik (BPS). Data sekunder berupa hasil publikasi berupa dokumen, laporan, atau artikel yang sudah tersedia sebelumnya. Aplikasi Eviews-10 digunakan sebagai alat statistik. Serta analisis regresi data panel digunakan sebagai alat analisis. Persamaan model regresi data panel dirumuskan dengan model sebagai berikut: $PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 BP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \epsilon_{it}$

Dimana:

PDRB	= Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
i	= Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
t	= Waktu (2013 hingga 2022)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien
PD	= Pajak Daerah
BP	= Belanja Pemerintah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
ϵ	= Error Term

Uji regresi data panel

Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random effect Model merupakan model yang dapat digunakan pada analisis regresi data panel. Dilakukan pula uji untuk memilih 3 model tersebut, tujuannya adalah untuk menentukan model terbaik serta yang paling tepat. Adapun uji tersebut adalah:

Uji chow

Untuk memilih antara model common effect dengan fixed effect maka harus dilakukan uji chow dengan hipotesis:

H0: Common effect Model digunakan

H1: Fixed effect Model digunakan

Jika nilai p value $< \alpha$, maka tolak H0, diartikan fixed effect digunakan. Uji Hausman harus dilakukan ketika fixed effect terpilih.

Uji hausman

Untuk menentukan model akhir terbaik antara fixed effect dengan random effect maka dilakukan dengan uji Hausman dengan hipotesis:

H0 : Random effect model digunakan

H1 : Fixed effect model digunakan

Jika nilai p value $< \alpha$, maka tolak H0, model fixed effect yang terbaik untuk digunakan.

Uji statistik f (uji simultan)

Dilakukannya analisis Uji F bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh dan hubungan yang ada dari variabel independen secara serentak dengan variabel dependen. Pengaruh dan hubungan dapat berupa signifikan atau tidak signifikan. Adapun kriteria pengujian uji f yakni:

Apabila F-hitung $< \alpha$, maka adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen; dan

Apabila F-hitung $> \alpha$, maka tidak adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Koefisien determinasi (R²)

Tujuan analisis ini guna mengetahui sejauh apa variasi terjadinya perubahan pada variabel dependen dapat dan mampu diterangkan oleh variasi/perubahan pada variabel

independen. Nilai yang dimiliki pada koefisien determinasi berapa pada antara nol dan satu $0 < R^2 < 1$ (Alwi et al., 2019)

Uji asumsi klasik Multikolinieritas

Sebagai penentuan apakah ada variabel independen yang mempunyai kesamaan atau kemiripan terhadap variabel independen yang lainnya dapat dilakukan dengan uji multikolinieritas. Kriteria untuk uji ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas adalah jika nilai condition index < 15 , (Susanto et al., 2015).

Heteroskedastisitas

Sebagai penentuan apakah nilai residual dari model yang diteliti mempunyai varian yang tetap dan konstan atau tidak maka harus dilakukan uji heteroskedastisitas (Nurdany, 2012). Kriteria untuk uji ini adalah dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika hasil nilai probabilitas $> 0,05$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	98.734034	(2,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	66.666738	2	0.0000

Nilai prob $0.0000 < 0,05$, maka yang terpilih adalah MODEL FEM

Hasil uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.619281	3	0.8920

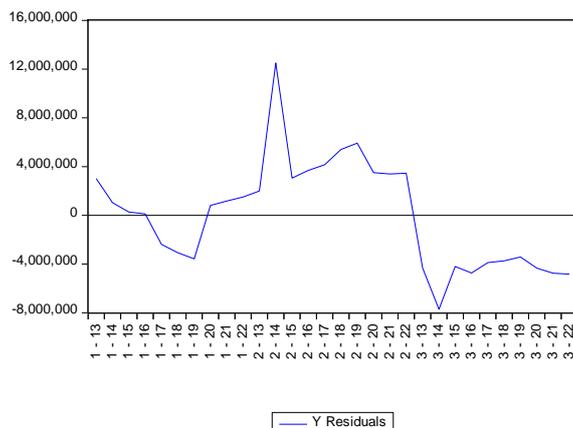
Nilai Prob $0,8920 > 0,05$, Maka Yang Terpilih Adalah Model Rem

Hasil uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.931411	-0.049574
X2	0.931411	1.000000	-0,047856
X3	-0.049574	-0.047856	1.000000

Koefisien korelasi x1 dan x2 sebesar $0,931411 < 0,85$, x1 dan x3 sebesar $-0,049574 < 0,85$, dan x2 dan x3 sebesar $-0,047856 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Heteroskedasitas



Dari grafik residual dapat dilihat tidak melewati batas, artinya varian residual sama, oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau lolos uji heterokedasitas. Persamaan Regresi Data Panel: $Y = -5.47098286953e-05 \cdot X_1 + 0.00252496396383 \cdot X_2 + 999437.898845 \cdot X_3 - 49583523.4278$

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis

- H0₁ : Variabel PD tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- Ha₁ : Variabel PD berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- H0₂ : Variabel BP tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- Ha₂ : Variabel BP berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- H0₃ : Variabel IPM tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- Ha₃ : Variabel IPM berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- H0₃ : Variabel BP, PD, IPM tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- Ha₃ : Variabel BP, PD, IPM berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara

Hasil Uji t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/23 Time: 11:27				
Sample: 2013 2022				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-5.47E-05	0.006369	-0.008589	0.9932
X2	0.002525	0.001759	1.435849	0.1630
X3	999437.9	315440.0	3.168393	0.0039
C	-49583523	23774854	-2.085545	0.0470

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Uji t pada variabel PD(X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,008589 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,068658 dan nilai sig. 0,9932 >0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variable BP tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
- b. Hasil Uji t pada variable BP(X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 1.435849 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,068658 dan nilai sig. 0,1630 >0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variable BP tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara

c. Hasil Uji t pada variabel IPM(X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 3.168393 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,068658 dan nilai sig. $0,0039 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variable IPM berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara.

UJI F

R-squared	0.482727
Adjusted R-squared	0.423042
S.E. of regression	4666617.
Sum squared resid	5.66E+14
Log likelihood	-501.1000
F-statistic	8.087873
Prob(F-statistic)	0.000572

Nilai F hitung sebesar 8.087873 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,975154 dan nilai sig. 0.000572 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variable PD, BP, dan IPM berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.482727
Adjusted R-squared	0.423042
S.E. of regression	4666617.
Sum squared resid	5.66E+14
Log likelihood	-501.1000
F-statistic	8.087873
Prob(F-statistic)	0.000572

Nilai Adjusted R Square sebesar 0.423042 atau 42,3042%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PD, BP, dan IPM mampu menjelaskan variabel PDRB di Sumatera Utara sebesar 42,3042%, sedangkan sisanya yaitu 57,6958% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan namun positif, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan dan positif. Diharapkan meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, kebijakan yang tepat dalam pengalokasian belanja pemerintah, dan memperbanyak program peningkatan indeks pembangunan manusia, Untuk meningkatkan PDRB di Sumatera Utara.

Adapun saran yang penulis harapkan ialah Optimalkan Pajak Daerah: Evaluasi struktur dan tingkat Pajak Daerah untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Implementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Efisiensi Belanja Pemerintah: Tinjau dan perbarui alokasi anggaran untuk memastikan bahwa Belanja Pemerintah mendukung sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap PDRB. Identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah tanpa mengorbankan kualitas layanan. Investasi dalam Pengembangan Manusia: Tingkatkan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerah dalam hal produktivitas dan inovasi. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta: Bangun kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk

merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dorong partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB. Diversifikasi Ekonomi: Dorong diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor. Identifikasi peluang baru dalam sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan dorong investasi di bidang tersebut. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan: Implementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan Pajak Daerah, Belanja Pemerintah, dan program pembangunan manusia terhadap PDRB. Lakukan evaluasi periodik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dan sesuaikan strategi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Perhatikan Keberlanjutan Lingkungan: Dalam pengembangan ekonomi, pertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Implementasikan kebijakan dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan. Pengembangan Infrastruktur: Prioritaskan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jaringan transportasi dan ketersediaan energi. Dorong investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja: Tingkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dorong keterlibatan sektor industri dalam perencanaan kurikulum pendidikan untuk memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar. Adanya kebijakan dalam pengelolaan belanja pemerintah diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga kegiatan pengalokasian sumber daya pemerintah dapat sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, diharapkan kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan untuk lebih aktif dalam menggali potensi daerah masing-masing daerah sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Sumatera utara. Kebijakan pemerintah dengan lebih banyak menyediakan program peningkatan keterampilan, sehingga keterampilan masyarakat dapat meningkat agar lebih banyak penciptaan lapangan kerja sendiri. Kebijakan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan pajak daerah juga diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R., Sultan, U., Tirtayasa, A., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia*. 1(3).
- Badan Pusat Statistik (2023). *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah), 2006-2021*.
- Pengangguran, P., Ekonomi, P., Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten, D., Provinsi Jawa Tengah, K. di, Baeti, N., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2013). *EDAJ 2 (3) (2013) Economics Development Analysis Journal Dipublikasikan Agustus 2013*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- van Basten, E., Hudayah, S., Gani, I., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, F. (2021). Pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada pengangguran terbuka di indonesia. *FORUM EKONOMI*, 23(1), 340-350. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- World Bank. *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*.